



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT RAPAT KOMISI XIII DPR RI
(BIDANG: REFORMASI REGULASI DAN HAK ASASI MANUSIA)**

Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Sekretaris Negara; Kantor Staf Presiden; Komnas HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Sekretariat Jenderal MPR RI; Sekretariat Jenderal DPD RI.

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Persidangan	:	II (Dua)
Rapat	:	Ke – 9 (Delapan)
Hari, tanggal	:	Rabu, 26 November 2025
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XIII Gedung Nusantara II lantai 3
Acara	:	RDP dan RDPU dengan: 1. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM 2. Plt. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM 3. PT. Toba Pulp Lestari (TPL)
Ketua Rapat	:	Sugiat Santoso, S.E.,M.S.P. (Pimpinan Komisi XIII DPR RI/ F.Partai Gerindra)
Sekretaris Rapat	:	Sartomo, S.S., M.Si
Hadir	:	22 orang dari 42 orang Anggota Komisi XIII

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII pada Hari Rabu, 26 November 2025 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Bapak Sugiat Santoso, S.E., M.S.P,

Pimpinan Komisi XIII DPR RI/F.Partai Gerindra selaku Ketua Rapat, dan rapat dinyatakan **terbuka** untuk umum.

2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat ini membahas:
 - a. Tindak Lanjut Rapat Dengar Pendapat tanggal 17 November 2025
 - b. Penjelasan PT. Toba Pulp Lestari Tbk. terkait komitmen Perseroan dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan kegiatan operasionalnya

II. KESIMPULAN RAPAT :

1. Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian HAM RI untuk memastikan bahwa Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bekerja secara independen, objektif, dan transparan, sebagai kelanjutan dari temuan Rapat Dengar Pendapat 3 Oktober 2025 yang mengungkap fakta terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam konflik agraria di area konsesi PT Toba Pulp Lestari.
2. Komisi XIII DPR RI mendorong Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyampaikan laporan perkembangan investigasi secara berkala, sistematis dan berbasis data yang mencakup kemajuan, temuan lanjutan, hambatan struktural maupun kendala teknis dilapangan serta proyeksi tindak lanjut yang diperlukan.
3. Komisi XIII DPR RI mendorong PT Toba Pulp Lestari untuk memberikan akses penuh, kepada TGPF untuk keperluan kelengkapan data atas dokumen yang dibutuhkan, lokasi operasional, area konsesi, peta konflik, serta data relevan lainnya.
4. Komisi XIII DPR RI mendorong PT Toba Pulp Lestari untuk mengambil inisiatif perbaikan yang konkret, terukur, dan selaras dengan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM, dengan langkah-langkah perbaikan awal yang bersifat substantif sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dan itikad baik melalui tindakan nyata yang dapat memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Komisi XIII DPR RI bersama dengan Kementerian HAM RI akan meninjau secara langsung perkembangan kasus dalam konflik agraria di area konsesi PT Toba Pulp Lestari untuk memastikan penyelesaian sengketa yang berkeadilan.
6. Komisi XIII DPR RI akan meneruskan kasus ini untuk ditindaklanjuti melalui Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria yang dibentuk oleh DPR RI.

7. Komisi XIII DPR RI meminta jawaban tertulis dari Kementerian HAM RI dan PT Toba Pulp Lestari atas seluruh pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB

Jakarta, 26 November 2025

KETUA RAPAT,

TTD

SUGIAT SANTOSO,S.E., M.S.P.

A-73

Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM

**Plt. Dirjen Instrumen
dan Penguatan HAM,**

TTD

TTD

Munafrizal Manan

Dr. Harniati

Komisaris Utama PT. Toba Pulp Lestari,

TTD

Ignatius Purnomo

